

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan situasi yang sangat kompleks menjadi masalah utama yang semakin sulit dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang diberbagai dunia. Tingginya tingkat kemiskinan disuatu daerah menunjukkan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi kemiskinan berimplikasi pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercermin dari keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas serta pendapatan masyarakat.

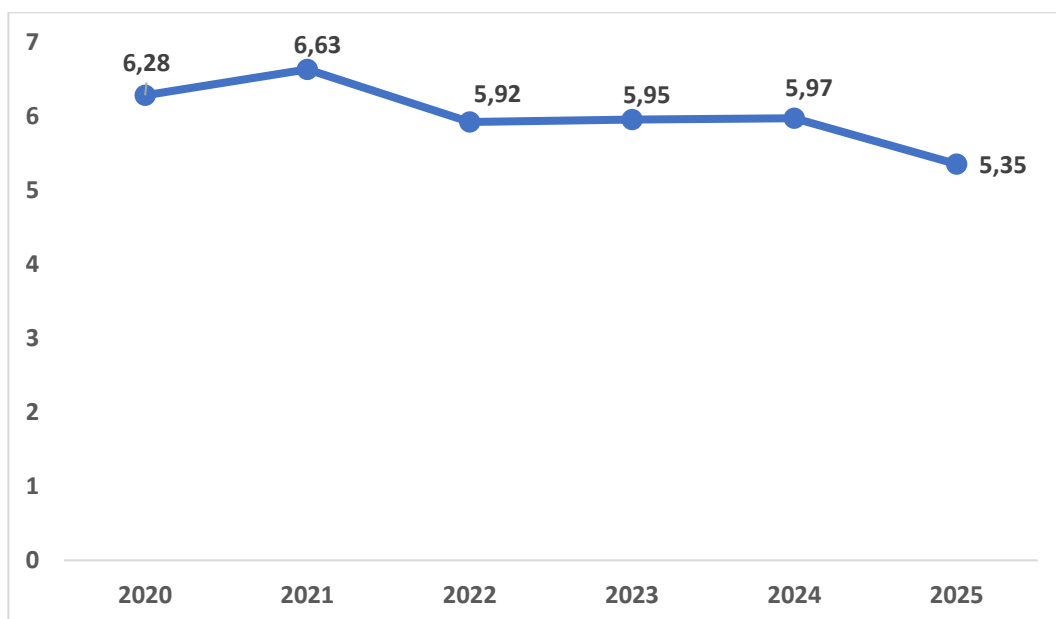
Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2024), kemiskinan adalah sebuah keadaan dimana masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup baik dalam sektor sandang, papan, ataupun pangan sekalipun. Ketidakmampuan dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan dan bukan makanan ini ditakar berdasarkan aspek pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah bagi individu di masyarakat karena pekerjaan yang berpenghasilan rendah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Semakin tinggi persentase penduduk miskin maka semakin rendah tingkat kesejahteraan negara tersebut.

Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari perekonomian nasional yang tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar 5,35 persen yang cukup tinggi dibandingkan Kepulauan Bangka Belitung yaitu 5,00 persen dan Kepulauan Riau yaitu sebesar

4,44 persen, dan beberapa Provinsi lain yang ada di Sumatera. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Nasional, Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah. Selama periode 2020–2025, persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat berada pada kisaran 5,35%–6,63%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada kisaran 8,47%–10,19%. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat telah sepenuhnya teratasi. Masih terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota yang menunjukkan adanya disparitas pembangunan di dalam provinsi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. (Badan Pusat Statistik, 2025).

Menurut Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Barat (2025), Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 19 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tercermin dari tingkat kemiskinan pada masing-masing daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, terdapat disparitas tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota. Seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat kemiskinan sebesar 13,64%, Kabupaten Solok Selatan sebesar 7,18%, Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 6,63%, Kota Padang sebesar 4,20%, sedangkan Kota Sawahlunto memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 2,27%. Kondisi ini menggambarkan adanya ketimpangan yang kuat dalam distribusi pendapatan. Maka dari itu penting untuk diteliti kondisi disparitas abantara

kabupaten/kota di Sumatera Barat. Ketimpangan ini berkaitan dengan perbedaan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi angkatan kerja antar daerah. Berikut menunjukkan data persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat:



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat Tahun 2020-2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026

Berdasarkan Gambar 1.1 kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020–2025, dapat diketahui mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan sebesar 6,28 persen, kemudian meningkat menjadi 6,63 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya pendapatan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi menurun sehingga jumlah penduduk miskin meningkat. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 5,92 persen. Penurunan ini menunjukkan mulai pulihnya

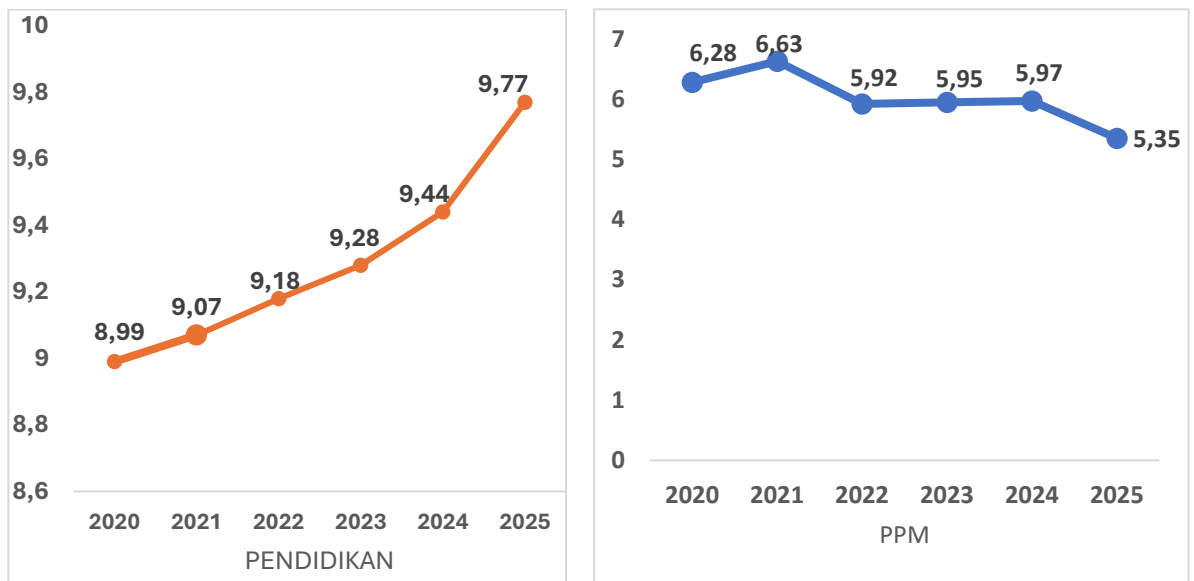
kondisi ekonomi masyarakat setelah pandemi, yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas usaha dan terbukanya kembali lapangan pekerjaan.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024 tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami sedikit peningkatan, masing-masing menjadi 5,95 persen dan 5,97 persen. Perubahan tersebut terjadi pada kondisi ketika komoditas makanan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan, yaitu sebesar 75,94 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar makanan memiliki peranan penting dalam penentuan Garis Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024). Selanjutnya, pada 2025 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 5,35 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025). Penurunan tersebut berlangsung bersamaan dengan berbagai upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui pendekatan graduasi (Provinsi Sumatera Barat, 2025). Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat masih mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, khususnya pendidikan, kesehatan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Rendahnya kualitas pendidikan dalam suatu daerah juga dapat menjadi faktor penyebab tingginya persentase penduduk miskin.

Pendidikan dapat merubah pola berfikir seseorang dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Susanto & Pangesti, 2019). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan kemampuan masyarakat memperoleh

pendidikan yang lebih tinggi dan peluang masuk ke pasar kerja. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar kemungkinan individu untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Selama periode 2020-2025, peningkatan RLS di Sumatera Barat cenderung lambat dan tidak merata antar Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 8,21 tahun sedangkan Kota Padang Panjang 12,01 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang berada di Kabupaten belum menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan berimplikasi pada peluang kerja serta tingkat kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2025).

Seseorang dengan RLS rendah cenderung kurang memiliki kemampuan literasi dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang berpenghasilan stabil. Sebaliknya semakin tinggi RLS, semakin besar peluang seseorang memasuki pasar kerja yang produktif dan memperoleh pendapatan tinggi. Pendidikan bermanfaat untuk mengembangkan potensi diri dan melatih keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri dan masyarakat. Melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan produktivitas yang dimana pendapatan juga meningkat dan dapat mengurangi peluang seseorang untuk jatuh dalam kemiskinan (Zaqiah dkk, 2023). Berikut data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Sumatera Barat:



Gambar 1. 2 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) dan Persentase Penduduk Miskin (Persen) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (BPS), 2026

Berdasarkan Gambar 1.2 pendidikan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020–2025, yang diukur melalui rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah sebesar 8,99 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 9,77 tahun pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan semakin baik. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan menjadi 6,63%, dan pendidikan juga meningkat menjadi 9,07. Hal ini tidak sejalan dengan teori Teori Modal Manusia yang menyatakan bahwa Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan keluar dari kemiskinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan belum secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Sejalan dengan penelitian (Surbakti, 2023) dalam penelitiannya menyatakan Rata-rata Lama sekolah berpengaruh dengan berbanding lurus

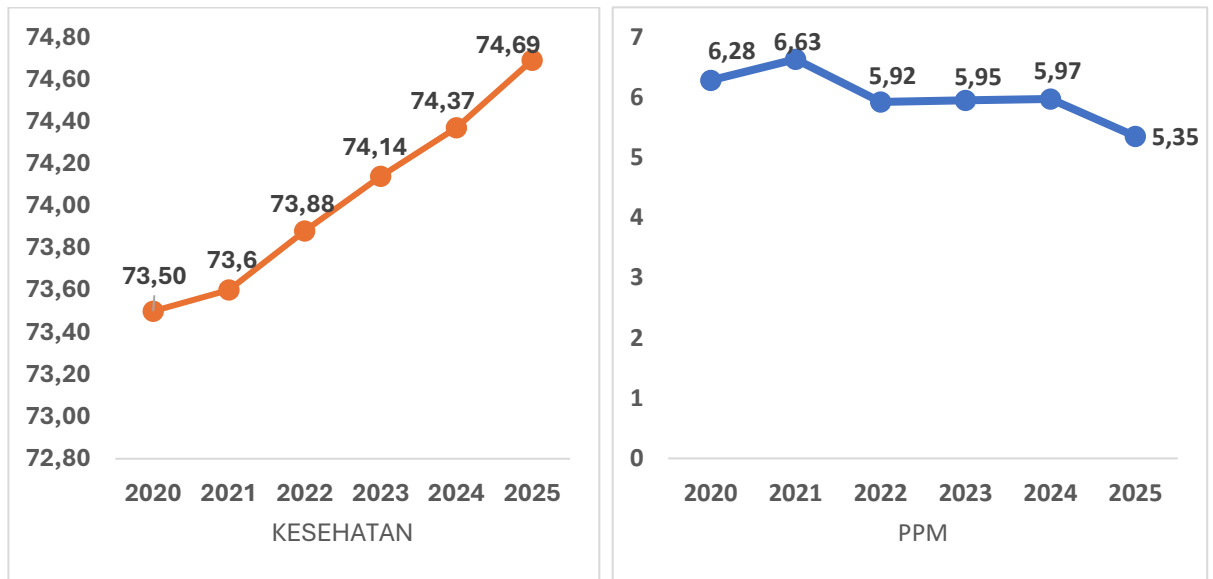
(positif) terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Menurut Balqis dkk (2025), dalam penelitiannya menyatakan pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, (Cholily 2024) Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Fernando dan Samsuddin 2025) pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Serly dkk 2025) pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan hasil temuan tersebut menunjukkan apabila terjadi peningkatan di sektor pendidikan maka akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi maka seseorang harus memiliki kesehatan yang baik. Tingkat kesehatan yang tinggi membuat seseorang lebih produktif. Hal ini juga mempengaruhi pekerjaan serta penghasilan yang mereka terima. Penghasilan yang lebih tinggi dapat meningkatkan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi kemiskinan. Kesehatan merupakan suatu investasi dalam meningkatkan dan juga memperbaiki produktivitas serta kualitas sumber daya manusia sekaligus untuk menjadikan taraf kehidupan masyarakat lebih baik (Adhitya dkk, 2022). Hidup dalam kemiskinan akan mengakibatkan masyarakat hidup dilingkungan yang buruk serta tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kesehatan, sehingga hal tersebut akan menyebabkan masyarakat miskin rentan terkena penyakit.

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), Umur Harapan Hidup (UHH) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. UHH menggambarkan perkiraan rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola

morbiditas dan kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Hingga Juni 2024 Kota Padang mencatat 2.122 kasus Tuberkulosis (TBC), suatu beban kesehatan yang cukup signifikan bagi masyarakat dan rumah tangga miskin. Beban ini tidak hanya mengganggu produktivitas kerja namun juga menurunkan kapasitas ekonomi dan meningkatkan risiko kemiskinan (Antaraneews, 2024).

Umur Harapan Hidup (UHH) mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat serta efektivitas sistem pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Peningkatan UHH menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesehatan yang memungkinkan penduduk memiliki usia produktif yang lebih panjang dan kemampuan kerja yang lebih optimal, sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sedangkan, penurunan UHH mencerminkan memburuknya kondisi kesehatan yang dapat menghambat partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan beban biaya kesehatan rumah tangga, serta menurunkan produktivitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperbesar risiko kemiskinan dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fernando & Samsuddin, 2025). Berikut ini merupakan data Umur Harapan Hidup di Provinsi Sumatera Barat:



Gambar 1. 3 Umur Harapan Hidup (Tahun) dan Persentase Penduduk Miskin (Persen) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (BPS), 2026

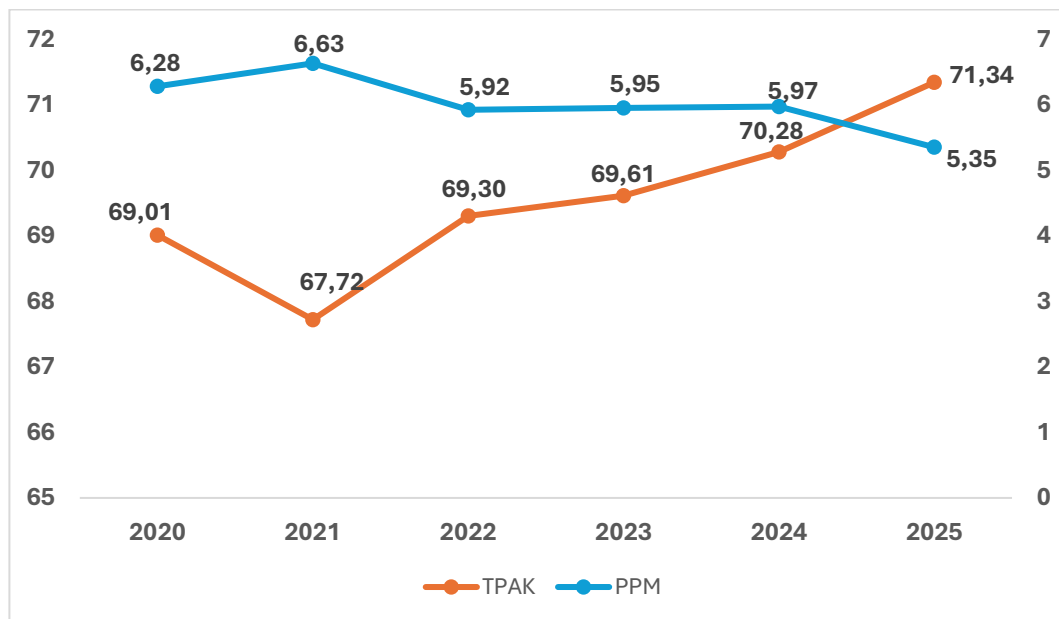
Berdasarkan Gambar 1.3 kesehatan dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020–2025, yang diukur melalui angka harapan hidup terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 angka harapan hidup sebesar 73,50 tahun dan meningkat menjadi 74,69 tahun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Sumatera Barat semakin membaik. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari 6,28% menjadi 6,63%, sementara kesehatan juga mengalami peningkatan dari 73,50 menjadi 73,79. Hal ini tidak sejalan dengan teori Schultz (1961) menyatakan bahwa kesehatan merupakan salah satu komponen utama modal manusia yang berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesehatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan serta dapat menurunkan kemiskinan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat belum secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor ekonomi pada masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan melemahnya aktivitas ekonomi. Dengan demikian, meskipun kualitas kesehatan masyarakat membaik, tekanan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 masih menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Fenomena ini sejalan (Cholily, 2024) dalam penelitiannya menyatakan kesehatan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran sektor kesehatan tidak mampu mengurangi kemiskinan. Menurut Nurdianti & Samsuddin (2024), menyatakan dalam penelitiannya bahwa kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Mafuzhah dkk, 2026) kesehatan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Putra, 2025) menyatakan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Lubis & Riani, 2026) menyatakan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berkontribusi terhadap penurunan persentase penduduk miskin.

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik akan memungkinkan mereka mendapatkan penawaran kerja yang lebih besar. Ketika penduduk berada pada usia produktif maka dapat masuk dalam pasar tenaga kerja yang tercermin dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Angkatan kerja

yaitu penduduk yang bekerja serta pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. TPAK menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam aktivitas ekonomi dan pasar tenaga kerja. Rendahnya partisipasi kerja berarti banyak penduduk tidak memperoleh penghasilan, sehingga berdampak pada pendapatan rumah tangga yang rendah. Dengan meningkatnya TPAK semakin banyak kesempatan individu memperoleh penghasilan tetap, yang akhirnya membantu mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut (Lillah & Arisetyawan, 2025).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan sejauh mana penduduk usia produktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dan berperan penting dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu wilayah. Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat perbedaan karakteristik ekonomi antar kabupaten/kota, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didominasi sektor informal dan Kota Padang Panjang dengan struktur ekonomi yang lebih beragam, menyebabkan variasi efektivitas TPAK dalam menurunkan kemiskinan. Tingginya TPAK tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan apabila kesempatan kerja yang tersedia bersifat informal dan berproduktivitas rendah. Sebaliknya, peningkatan TPAK yang disertai dengan ketersediaan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan (Sihitet dkk, 2024) Berikut ini merupakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Barat:



Gambar 1. 4 Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat tahun 2020-2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Berdasarkan Gambar 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020–2025, dapat diketahui bahwa TPAK mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Pada tahun 2020 TPAK sebesar 69,01 persen, kemudian menurun menjadi 67,72 persen pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang membatasi pekerjaan yang menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2025 TPAK kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 71,34 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang masuk ke dalam pasar kerja dan terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2022–2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 69,30% hingga mencapai 70,28% pada tahun 2024, tetapi kemiskinan juga ikut meningkat dari 5,92% pada tahun 2022 mencapai 5,97% pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja belum diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Dengan demikian, semakin banyak penduduk yang masuk ke pasar kerja, tetapi belum seluruhnya memperoleh pekerjaan yang produktif dan berpendapatan memadai sehingga belum mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini tidak sejalan dengan teori Penawaran Tenaga Kerja, teori ini menyatakan bahwa pasar tenaga kerja akan mencapai keseimbangan melalui mekanisme upah, sehingga peningkatan partisipasi angkatan kerja seharusnya diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, semakin banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan TPAK belum secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Sejalan dengan penelitian (Fitria & Novita, 2024) dalam penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian (Serly dkk, 2025) menyatakan Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Penelitian (Novita dkk, 2026) menyatakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Menurut Sianturi dkk. (2024) penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian (Christy dkk 2024), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan TPAK cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, tetapi pengaruh tersebut tidak terbukti signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja semata tidak cukup untuk menjamin penurunan kemiskinan tanpa didukung oleh faktor-faktor lain seperti kualitas pekerjaan, produktivitas, dan kesempatan kerja yang layak. Dengan demikian, kebijakan yang hanya fokus pada peningkatan jumlah partisipasi kerja perlu dilengkapi dengan strategi meningkatkan kualitas lapangan kerja dan pendapatan pekerja agar dapat berdampak lebih efektif terhadap pengentasan kemiskinan.

Penelitian mengenai determinan kemiskinan di Indonesia, termasuk Sumatera Barat masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Sebagian besar studi terdahulu menggunakan data sebelum tahun 2020 sehingga belum menangkap dinamika pasca pandemi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Athadena (2021), meneliti pengaruh pendidikan, kesehatan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2011-2020. Selanjutnya Penelitian Ramadhani dan Widianita (2024), juga mengkaji hubungan TPAK terhadap kemiskinan di Sumatera Barat, tetapi hanya menggunakan TPAK sebagai variabel independen. Putra dan Hendarto (2022) meneliti pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2016–2021. Puteri & Marwan (2023) mengetahui pengaruh pengangguran, pengeluaran per kapita, pendidikan, kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, pada penelitian Salfina & Destika (2021) membahas pengaruh pengangguran, jumlah penduduk, dan Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat penelitian hanya menyoroti satu atau dua variabel sosial sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana pendidikan, kesehatan, TPAK secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu gabungan antara data cross section dan time series. Data cross section terdiri atas 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan data time series mencakup periode 2020–2025. Penggunaan data panel dipilih karena karakteristik tingkat kemiskinan pada setiap kabupaten/kota tidak hanya berbeda antarwilayah, tetapi juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, analisis dengan data panel dinilai lebih tepat karena mampu menangkap variasi data berdasarkan dimensi wilayah dan waktu secara bersamaan, sehingga hubungan antara pendidikan, kesehatan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh pendidikan, kesehatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
4. Mengetahui pengaruh pendidikan, kesehatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian empiris dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjabarkan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan TPAK dalam menurunkan kemiskinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis yang didapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengenai pengaruh pendidikan, kesehatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- b. Memberikan pengetahuan bagi peneliti dan akademis mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk menangani dan mengatasi tingkat kemiskinan, dan memberikan informasi terhadap peneliti lain sebagai referensi dalam penelitian mengenai pengaruh pendidikan, kesehatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.